

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN**

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

(SKRIPSI)

**Oleh
MUHAMMAD BURHAN ABIDIN**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CHARACTERISTIC LOCAL GOVERNMENT TO FINANCIAL PERFORMANCE (Empirical Studies at Local Government Regencies/Municipalities in Indonesia)

By

MUHAMMAD BURHAN ABIDIN

The purpose of study is to find out the influence of wealth, dependence to central government, leverage, and legislative size to financial performance. This research used purposive sampling with number of samples as 231 local government regencies/municipalities in Indonesia at 2015 with multiple regression. Based on the results of research shown that wealth, general allocation fund, and legislative size haven't positive influence and not significant to effectivities ratio. While, leverage have negative and significant influence with effectivity ratio. So, only one hypothesis which proven. Meanwhile the results of research to the efficiencies ratio shown that wealth, and general allocation fund have negative influence and significant to efficiencies ratio. Leverage don't have negative influence to efficiency ratio. In other ways, legislative size don't have negative influence to the efficiency ratio of local government. In efficiency ratio with negative influence mean better financial performance.

Keywords: *Wealth, dependence to central government, leverage, legislative size, effectivity ratio, and efficiency ratio.*

ABSTRAK

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

Oleh

MUHAMMAD BURHAN ABIDIN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kekayaan pemerintah daerah, ketergantungan terhadap pusat, *leverage*, dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 231 sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015 dengan alat analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Alokasi Umum, dan jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio efektivitas pemerintah daerah. Sedangkan hanya *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio efektivitas pemerintah daerah. Sehingga hanya satu hipotesis yang terbukti dalam rasio efektivitas ini. Sedangkan hasil dari penelitian dengan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio efisiensi pemerintah daerah. *Leverage* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio efisiensi pemerintah daerah. Di sisi lain, jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi pemerintah daerah. Dalam pengukuran rasio efisiensi berpengaruh negatif sama artinya semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kata kunci: Kekayaan daerah, ketergantungan terhadap pusat, *leverage*, ukuran legislatif, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Oleh

Muhammad Burhan Abidin

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

Judul Skripsi

**: PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)**

Nama Mahasiswa

: Muhammad Burhan Abidin

Nomor Pokok Mahasiswa : 1511031148

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001


Chara Pratami T.T., S.E., M.Acc., Akt.
NIP 19851203 201012 2 004

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**

Rogi
.....

Sekretaris : **Chara Pratami T.T., S.E., M.Acc., Akt.**

Rara
.....

Penguji Utama : **Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., C.A., CPA.**

Munir

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Satria

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Burhan Abidin

NPM : 1511031148

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia) ” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017
Penulis,



Muhammad Burhan Abidin
NPM 1511031148

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, putra sulung dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formalnya antara lain:

1. SD Negeri 1 Ngagel, lulus tahun 2002.
2. SMP Negeri 1 Tayu, lulus tahun 2005.
3. SMA Negeri 1 Pati, lulus tahun 2008.

Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Diploma III spesialisasi Akuntansi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Penempatan setelah lulus dari STAN di Perwakilan BPKP Maluku mulai tahun 2012 hingga tahun 2015.

Penulis mendapatkan kesempatan belajar Program Strata 1 (S1) di Universitas Lampung berkat program STAR (*State Accountability Revitalization*) jurusan Akuntansi pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 penulis melakukan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

.

SANWACANA

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat dan segala rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, nasihat dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, bantuan, dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi;

5. Ibu Chara Pratami T.T., S.E., M.Acc., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, bantuan, dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA.,CPA. sebagai Dosen Penguji atas masukan, saran, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi dan Dekanat FEB atas semua pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan;
8. Kedua orang tuaku, Sulistyono dan Noor Insiyah atas dukungan dan doanya;
9. Istriku dan anakku tercinta, Dian Kusumasari, S.E., dan Alisha Ayu Labibah atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan cintanya;
10. Kedua mertuaku, Sudarman dan Sumilah atas dukungan dan doanya;
11. Teman-teman seperjuangan STAR BPKP Unila Batch 2;
12. Seluruh kerabat, sahabat, teman dan pihak-pihak yang sudah membantu dan mendoakan namun, tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan maupun pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, September 2017
Penulis,

Muhammad Burhan Abidin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Keagenan	10
2.2 <i>Good Public Governance</i>	11
2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah	12
2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Hipotesis Penelitian	16
2.6.1. Kekayaan Daerah	16
2.6.2. Tingkat Ketergantungan pada Pusat	17
2.6.3. <i>Leverage</i>	18
2.6.4. Ukuran Legislatif	19
2.7 Kerangka Penelitian	20
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Metode Pengumpulan Data	23
3.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Variabel Penelitian	23
3.4.1 Variabel Dependen	24
3.4.2 Variabel Independen	25
3.4.2.1 Kekayaan Daerah	25

	3.4.2.2	Tingkat Ketergantungan pada Pusat	26
	3.4.2.3	<i>Leverage</i>	26
	3.4.2.4	Ukuran Legislatif	26
3.5		Metode Analisis Data	27
	3.5.1	Statistik Deskriptif	27
	3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	27
	3.5.2.1	Uji Normalitas	27
	3.5.2.2	Uji Multikolonieritas	28
	3.5.2.3	Uji Heterokedastisitas.....	28
	3.5.2.4	Uji Autokorelasi	29
	3.5.3	Analisis Regresi Berganda.....	29
	3.5.4	Pengujian Hipotesis	30
	3.5.4.1.	Pengujian Koefisien Determinasi	31
	3.5.4.2.	Pengujian Koefisien Regresi Parsial.....	31
IV. PEMBAHASAN			
4.1		Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	32
4.2		Proses Seleksi Sampel.....	32
4.3		Hasil Uji Analisis Data Penelitian.....	33
	4.3.1	Statistik Deskriptif	33
	4.3.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	37
	4.3.2.1.	Hasil Uji Normalitas	37
	4.3.2.2.	Hasil Uji Multikolonieritas	40
	4.3.2.3.	Hasil Uji Heterokedastisitas	42
	4.3.2.4.	Hasil Uji Autokorelasi	43
4.4		Pengujian Hipotesis.....	44
	4.4.1.	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	44
	4.4.2.	Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	46
4.5		Pembahasan Hasil Penelitian	52
	4.5.1	Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Rasio Efektivitas	52
	4.5.2	Pengaruh DAU terhadap Rasio Efektivitas	53
	4.5.3	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Rasio Efektivitas	54
	4.5.4	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efektivitas.....	54
	4.5.5	Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Rasio Efisiensi.....	56
	4.5.6	Pengaruh DAU terhadap Rasio Efisiensi.....	57
	4.5.7	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Rasio Efisiensi	57
	4.5.8	Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Rasio Efisiensi	58
V. SIMPULAN DAN SARAN			
5.1		Simpulan	59
5.2		Keterbatasan Penelitian	61
5.3		Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
3.1 Persentase Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	24
3.2 Persentase Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	24
4.1 Seleksi Pemerintah Daerah Berdasarkan Kriteria Sampel.....	33
4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	34
4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> untuk Rasio Efektivitas.....	38
4.4 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> untuk Rasio Efisiensi	38
4.5 Hasil Uji Multikolonieritas pada Rasio Efektivitas	41
4.6 Hasil Uji Multikolonieritas pada Rasio Efisiensi	41
4.7 Hasil Uji Autokorelasi pada Rasio Efektivitas	44
4.8 Hasil Uji Autokorelasi pada Rasio Efisiensi	44
4.9 Hasil Uji R untuk Rasio Efektivitas.....	45
4.10 Hasil Uji R untuk Rasio Efisiensi	45
4.11 Hasil Uji t Terhadap Rasio Efektivitas	46
4.12 Hasil Uji t Terhadap Rasio Efisiensi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	21
4.1 Histogram Rasio Efektivitas	39
4.2 Histogram Rasio Efisiensi	40
4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas untuk Rasio Efektivitas	42
4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas untuk Rasio Efisiensi	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Sampel Pemerintah Daerah	L-1
2. Sampel Pemerintah Kabupaten/Kota yang terlambat melaporkan LKPD ...	L-6
3. Statistik Deskriptif	L-7
4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk Rasio Efektivitas	L-7
5. Hasil Uji t dan Multikolonieritas untuk Rasio Efektivitas	L-7
6. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram untuk Rasio Efektivitas	L-8
7. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik untuk Rasio Efektivitas	L-8
8. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> untuk Rasio Efektivitas	L-9
9. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> untuk Rasio Efektivitas	L-9
10. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji D-W untuk Rasio Efektivitas	L-10
11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk Rasio Efisiensi	L-10
12. Hasil Uji t dan Multikolonieritas untuk Rasio Efisiensi	L-10
13. Hasil Uji Normalitas dengan Histogram untuk Rasio Efisiensi	L-11
14. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik untuk Rasio Efisiensi	L-11
15. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> untuk Rasio Efisiensi	L-12
16. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> untuk Rasio Efisiensi	L-12
17. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Uji D-W untuk Rasio Efisiensi	L-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marfiana dan Kurniasih (2013) menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Marfiana dan Kurniasih, 2013).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana dalam melakukan pembangunan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu untuk dilakukan pengukuran agar dapat memberikan suatu pernyataan keberhasilan pemerintah daerah dan dapat diidentifikasi perbaikan jika memang diperlukan.

Kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2012). Rasio keuangan merupakan perbandingan antar pos-pos dalam laporan keuangan yang memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai media untuk menginformasikan kinerja keuangan sebagaimana dinyatakan oleh Cohen (2006) yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel penelitiannya.

Dalam pengukuran kinerja pemerintah menurut Mardiasmo (2009) diperlukan indikator atau tolok ukur yang dapat dinyatakan secara jelas. Tolok ukur pemerintah biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam sebuah konsep pendekatan pengukuran kinerja berupa *value for money*. Ekonomis adalah konsep mengaitkan antara jumlah *input* dengan nilai *input*, sementara efisiensi yaitu membandingkan

antara jumlah *input* dengan *output* serta efektivitas mengaitkan *output* dengan *outcome*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai, tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat. Permasalahan yang umum terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana (BPK, 2015).

Dalam beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja pemerintah antara lain menunjukkan hasil yang beragam salah satunya Lin *et al.* (2010) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan pemerintah daerah, Produk Domestik Bruto (PDB), impor, ekspor, dan *incomes of family* terhadap kinerja ekonomi di China. Seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Coll *et al.* (2006) melakukan penelitian dengan variabel pengaruh pajak, transfer daerah, pendapatan daerah, *leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja Pemda. Hasil yang diperoleh antara lain menemukan

bukti bahwa hanya transfer daerah dan *leverage* yang berpengaruh terhadap kinerja (efisiensi) Pemda di Spanyol untuk tahun 2006.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Sebagai konsekuensi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian Lin *et al.* (2010), dan Mustikarini dan Fitriarsi (2012) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kekayaan daerah. Akan tetapi dalam penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang menunjukkan hasil berbeda itu dilakukan oleh Coll *et al.* (2006), Kusumawardani (2012), Artha *et al.* (2015), dan Noviyanto dan Kiswanto (2016).

Hasil penelitian Suhardjanto *et al.* (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen. Ia memasukkan *leverage* dalam mengukur utang pemerintah daerah dan variabel jumlah anggota DPRD untuk menjelaskan karakteristik pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan DPRD

dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Kusumawardani (2012) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah di Indonesia dengan menggunakan empat variabel yaitu *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, dan *leverage*. Penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu *size* pemerintah daerah dan ukuran legislatif. Penelitian yang dilakukan Artha *et al.* (2015) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kusumawardani (2012) dan Perwitasari (2010).

Fungsi pengawasan oleh DPRD dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), Saragih dan Setyaningrum (2015) serta Noviyanti dan Kiswanto (2016) yang menyimpulkan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arifianti, *et al.* (2013) yang mendapatkan bukti bahwa pengawasan oleh DPRD tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Penelitian ini dibatasi pada faktor pendapatan agar bisa menjadi fokus dalam pembahasan. Menurut peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti, karena ada beberapa kondisi yaitu pertama masih terjadinya ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, peneliti ingin mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cakupan obyek yang lebih luas. Terakhir, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memperbaiki kinerja di masa depan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah *leverage* pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah ukuran legislatif pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait:

1. Pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Pengaruh ketergantungan terhadap pusat pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
3. Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
4. Pengaruh ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi penulis tentang pengaruh kekayaan, tingkat ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kekayaan, tingkat ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai pengaruh kekayaan, tingkat ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan ukuran legislatif pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan terkait kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tinjauan teoritis dan hipotesis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Selain itu juga membahas uraian artikel-artikel serta penelitian-penelitian yang relevan untuk mendukung penulisan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode analisis, serta pengujian instrumen yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian dan penjelasan tentang gambaran umum hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan

metode-metode yang dijelaskan sebelumnya. Hasil analisis digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

BAB V Simpulan dan Saran

Merupakan bagian akhir yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil analisis data, pengujian hipotesis serta saran yang diajukan dan implikasi dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Definisi teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini berjalan lancar, maka pemilik mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Pembuatan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik inilah yang merupakan inti dari sebuah teori keagenan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik (*principal*) memiliki motivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan manajer (*agent*) memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi.

Menurut Meisser *et al.* (2006) dalam Masdiantini dan Erawati (2016) hubungan keagenan ini yang mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya asimetris informasi dan terjadinya konflik kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasikan ada dua cara untuk mengurangi masalah keagenan

yaitu investor luar melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*) (Kodrat dan Herdinata, 2009).

2.2 Good Public Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi dari peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas (Sumarto, 2003).

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa untuk mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung jalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanat (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.3 Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, karakteristik adalah mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu. Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Perbedaan karakteristik antar daerah diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Sumarjo, 2010). Dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah yang diukur rasio pendapatan asli daerah dengan total pendapatan, dana alokasi umum, *leverage* pemerintah daerah yang merupakan tingkat perbandingan utang dengan modal, dan ukuran legislatif.

2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Mardiasmo (2009) menjelaskan sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial.

Whittaker (1993) dalam Bastian (2006) menyatakan pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan publik.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP no 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Halim, 2007). Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2009) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah dan belanja daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah sebuah proses yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran di organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung unsur politik yang tinggi.

Syamsi (1986) dalam Susantih dan Saftiana (2009) menyatakan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Penganggaran publik menetapkan prioritas pemerintah bukan hanya untuk menentukan berapa besar dana yang tersedia untuk dihabiskan, namun juga harus menentukan kebijakan dan program yang akan diimplementasikan (Clynch dan Lauth, 1991). Dari perspektif ini, perkiraan pendapatan mengarahkan seluruh kebijakan dan program pemerintahan (Cornia, Nelson, dan Wilko, 2004).

2.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menguji tentang pengukuran kinerja pada pemerintah daerah, yaitu: Lin *et al.* (2010), Suhardjanto *et al.* (2010), Kusumawardani (2012), Sesotyaningtyas (2012), Artha *et al.* (2015), Suryaningsih dan Sisdyani (2016), serta Masdiantini dan Erawati (2016).

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Masalah Penelitian	Hasil
1.	Lin, <i>et al.</i> (2010)	Pengaruh pendapatan pemerintah daerah, Produk Domestik Bruto (PDB), impor, ekspor, dan <i>incomes of family</i> terhadap kinerja ekonomi di China terhadap indeks kinerja ekonomi di China	Tingkat kekayaan daerah yang diukur dari nilai PAD terhadap total pendapatan total Pemda berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Makin tinggi tingkat kekayaan daerah maka skor kinerja daerah tersebut makin tinggi.
2.	Suhardjanto <i>et al.</i> (2010)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP.	Karakteristik pemerintah daerah dengan mengambil dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Adanya pengaruh positif antara pendapatan pemerintah dengan pengungkapan wajib pemerintah daerah.
3.	Kusumawardani (2012)	Pengaruh karakteristik daerah (<i>size</i> , kemakmuran, ukuran, legislatif, <i>leverage</i>) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>Size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Indonesia, tetapi kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Sesotyaningtyas (2012)	Pengaruh <i>leverage</i> , ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa)	<i>Leverage</i> , ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> , dan pendapatan pajak daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan, secara parsial, <i>leverage</i> , ukuran legislatif, <i>intergovernmental revenue</i> dan pendapatan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
5.	Artha, <i>et al.</i> (2015)	Pengaruh karakteristik Pemda dan temuan BPK	Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal, <i>leverage</i> , dan

		terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB).	temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Akan tetapi, ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6.	Suryaningsih dan Sisdyani (2016)	Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).	Hasilnya antara lain kemakmuran, status daerah, dan belanja modal daerah tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan opini audit berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Pengaruh karakteristik Pemda, opini BPK, kemakmuran dan <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali).	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah kab/kota. Tetapi variabel kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Prov. Bali.

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1. Kekayaan Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dapat bersumber dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tingkat kekayaan daerah dapat diukur dengan PAD karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut (Artha, *et al.*, 2015). Penelitian Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Di mana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Hal ini sejalan dengan penelitian Julitawati, *et al.* (2012) dan Suhardjanto, *et al.* (2010) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Begitu juga penelitian Lin, *et al.* (2010) juga membuktikan bahwa pendapatan Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda di China.

(H_{1a}) : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektifitas.

(H_{1b}) : Kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efisiensi.

2.6.2. Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Pemerintah Pusat mengalokasikan suatu instrumen keuangan ke daerah berupa Dana Alokasi Umum. Pelaksanaan DAU ini memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik. Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012), Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat

maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah. Maka hipotesis yang akan diteliti adalah:

(H_{2a}) : DAU berpengaruh positif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektifitas.

(H_{2b}) : DAU berpengaruh negatif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efisiensi.

2.6.3. *Leverage*

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal. Sebagaimana semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut (Kusumawardani, 2012). Menurut Wild *et al.* (2005) *leverage* dapat diukur dengan *total debt ratio*, *total debt to equity*, *long term debt to equity ratio*. Yustika (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja. Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) juga membuktikan bahwa *leverage* dan *intergovernmental revenue* berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perwitasari (2010) menyatakan semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Sumarjo (2010) membuktikan bahwa semakin besar *leverage* semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sehingga kinerja keuangannya semakin buruk.

(H_{3a}) : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektifitas.

(H_{3b}) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efisiensi.

2.6.4. Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari fungsi pengawasan tersebut agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penelitian Wasistiono dan Wiyoso (2009) dalam Muhi (2011) mengemukakan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis, seiring perubahan sistem desentralisasinya. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan daerah.

Dalam penelitian Sumarjo (2010) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa

semakin besar anggota legislatif maka makin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya. Sehingga ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Giligan dan Matsusaka (2001) yang membuktikan terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota legislatif terhadap kebijakan pemasukan dan pengeluaran suatu pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Setyaningrum (2015) juga menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPRD suatu daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

(H_{4a}) : Ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektivitas.

(H_{4b}) : Ukuran legislatif memiliki pengaruh negatif terhadap rasio keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efisiensi.

2.7 Kerangka Penelitian

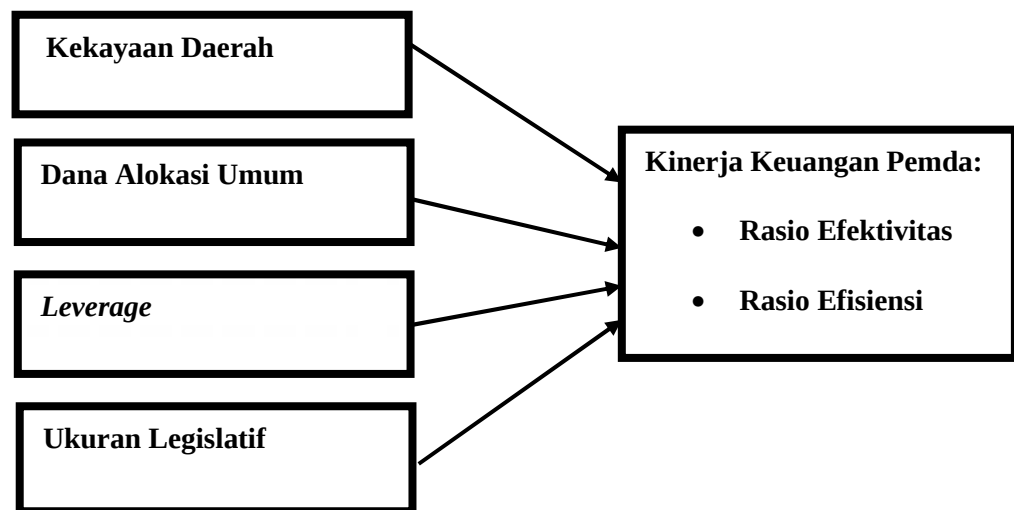
Kerangka berpikir adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Teori tersebut mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya dalam bidang masalah (Sekaran, 2006).

Penulis menganggap masalah-masalah yang penting dalam penelitian ini antara lain terdiri dari kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan jumlah anggota legislatif serta kinerja keuangan Pemda. Penelitian ini

bertujuan menguji pengaruh kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan jumlah anggota legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio ekonomis.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sekaran (2006), populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Penulis mengambil sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2015.
2. Terdapat jumlah anggota DPRD yang dirilis oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum.
3. Tersedianya seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diambil dari *website* resmi pemerintah maupun meminta langsung dari sumber terkait dan studi pustaka untuk mendapatkan data mengenai informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara:

- **Studi Pustaka**

Data dan teori yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, literatur, dan penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini.

- **Studi Dokumentasi**

Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan keuangan pemerintah daerah maupun data-data terkait penelitian ini melalui situs resmi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya antara lain kekayaan pemerintah daerah, ketergantungan pada pusat, *leverage*, dan jumlah anggota legislatif.

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen tersebut yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan rasio efektifitas pendapatan daerah. Menurut Mahsun (2016) rasio efektifitas dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Persentase Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Efektif
100%	Efektifitas Berimbang
<100%	Tidak Efektif

(Sumber: Mahsun, 2016)

Sedangkan kriteria penilaian efisiensi sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut:

Kriteria penilaian efisiensi sendiri dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Persentase Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Tidak efisien
100%	Efisiensi Berimbang
<100%	Efisien

(Sumber: Mahsun, 2016)

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.2.1. Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah karena merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016), Artha, *et al* (2015), dan Mustikarini dan Fitriasari (2012) mengukur tingkat kekayaan daerah dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dinyatakan dalam:

$\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$
--

3.4.2.2. Tingkat ketergantungan pada pusat

Tingkat ketergantungan menggambarkan suatu daerah yang memerlukan sumber dana dari luar. Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah, maka semakin besar bantuan yang diperlukan dari luar (dari pemerintah pusat dan provinsi).

Tingkat ketergantungan tersebut bisa diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$
--

3.4.2.3. *Leverage*

Leverage yaitu proporsi untuk mengukur perbandingan utang/kewajiban dari pihak eksternal dengan ekuitas/modal sendiri. Penelitian ini menggunakan *debt to equity* dalam mengukur *leverage*. Semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya.

$\text{Leverage} = \frac{\text{Kewajiban/Utang}}{\text{Ekuitas}}$

3.4.2.4. Ukuran Legislatif

Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran (Abdullah dan Asmara, 2006). DPRD atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk

dapat didayagunakan dengan baik (Kusumawardani, 2012). Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji statistik t.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi sehingga dapat dilihat dari rata-rata, standar deviasi, dan maksimum-minimum. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2013). Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisa grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013).

Pada analisa grafik, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat melalui hasil uji statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Glejser. Dalam uji Glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya.

Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi ini muncul karena observasi yang saling berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering terjadi pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013).

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Dalam model penelitian ini terdapat satu variabel terikat yang berhubungan dengan empat variabel bebas sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hal ini digunakan karena pada penelitian ini, teknik analisis regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara simultan (bersama-sama).

Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1:

$$\text{EFEK} = \beta_0 + \beta_1 \text{WEAL} + \beta_2 \text{DAU} - \beta_3 \text{LEVE} + \beta_4 \text{DPRD} + e$$

Model 2:

$$\text{EFIS} = \beta_0 + \beta_1 \text{WEAL} + \beta_2 \text{DAU} - \beta_3 \text{LEVE} + \beta_4 \text{DPRD} + e$$

Keterangan:

EFEK	= Rasio Efektivitas
EFIS	= Rasio Efisiensi
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
WEAL	= Kekayaan Daerah,
DAU	= Dana Alokasi Umum,
LEVE	= Tingkat <i>leverage</i> Pemda,
DPRD	= Ukuran legislatif.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regression* (analisis regresi linier berganda) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.4.1. Pengujian Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.5.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Cara untuk mengetahuinya apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen maka digunakan *significance level* sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi (*p value*) $>0,05$ maka secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Akan tetapi, bila nilai signifikansi (*p value*) $<0,05$ maka secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah (kekayaan daerah, Dana Alokasi Umum, *leverage*, dan DPRD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada tahun 2015. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ada beberapa simpulan yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas memiliki kinerja efektif. Hal ini dapat dilihat dari sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang efektif. Karena dianggap mampu merealisasikan pendapatan melebihi target yang telah ditentukan.
2. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi memiliki kinerja yang tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang tidak efisien. Karena belum bijak dalam melakukan pengeluaran daerah.

Hasil yang diperoleh antara lain sebagai berikut untuk rasio efektivitas:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan kekayaan daerah (*wealth*) berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas tidak terdukung.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas tidak terdukung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima maka hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin kuat.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap rasio efektivitas pemerintah daerah terdukung. Sehingga dapat disimpulkan semakin entitas tersebut tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri, maka semakin besar entitas tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain.
4. Hipotesis keempat yang menyatakan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap rasio efektivitas pemerintah daerah tidak terdukung. Dengan demikian, semakin besar kuantitas anggota DPRD belum tentu bisa meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan untuk rasio efisiensi:
1. Hipotesis pertama yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi terdukung.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi terdukung.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap rasio efisiensi pemerintah daerah tidak terdukung.

4. Hipotesis keempat yang menyatakan ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap rasio efisiensi pemerintah daerah tidak terdukung.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Populasi penelitian hanya dilakukan pada pemerintah daerah selama periode setahun yaitu tahun 2015.
2. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model penelitian hanya mampu menjelaskan pengaruh karakteristik pemerintah daerah sebesar 21,2 untuk rasio efektivitas dan 20,8% untuk rasio efisiensi sedangkan sisanya masing-masing 78,8% dan 79,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

5.3 Saran

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang berkualitas, dengan mempertimbangkan saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah:
 - a. Sebaiknya menambah program kerja yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar pemerintah daerah semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat.
 - b. Sebaiknya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

- c. Mengelola APBD dengan bijak agar bisa menciptakan efisiensi anggaran.
 - d. DPRD sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.
2. Pada penelitian selanjutnya:
- a. Diharapkan menggunakan sampel seluruh kabupaten/kota atau seluruh provinsi dengan menambahkan tahun pengamatan, sehingga hasil penelitian bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya pada sampel yang diambil.
 - b. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah seperti jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), variabel temuan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang*.
- Artha, Risma Diri., Basuki Prayitno, dan Alamsyah M.T. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*, vol. 11, hal 214-229.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Clynch, Edward., dan Thomas Lauth. 1991. *Governors, Legislators, and Budgets: Diversity across the American States*. Greenwood Press, New York.
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performamce in Greek Municipal. *Annual Conference. 5th*, HFAA. Thessaonica.
- Coll, Maria Teresa Balaguer., Diego Prior., dan Emili Tortosa Ausina. 2006. On the Determinant of Local Government Performance: A Two-Stage Nonparametric Approach. *European Economic Review (2007)*, pp. 425-451.
- Cornia, Gary C., Ray N., dan Andrea W. 2004. Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. *Public Administration Review*, vol. 63 (2), pp. 164-179.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X di Makassar*.
- Febriansyah, Abdullah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Universitas Bengkulu*.
- Giligan, Thomas W dan Matsusaka, John G. 2001. Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of The 20th Century. *National Tax Journal*, vol 54, pp 54-82.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi Ke-7. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Julitawati, Ebit., Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, vol. 1, Tahun 1 No. 1 hal 15-29.
- Kodrat, David Sukardi dan Christian Herdinata. 2009. *Manajemen Keuangan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analys Journal* hal. 27-35.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., dan Ho, Tsai-Neng. 2010. Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The Economic Performance of Local Government in China. *European Journal of Operation Research* ,Vol.209, pp 129-140.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marfiana, N. dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Hal 1-16
- Masdiantini, Putu Riesty. dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan, dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 14 Hal 1150-1182
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Hal 1-16.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi 15*. Hal 1-22.

- Nordiawan, D., Iswahyudi S.P., dan Maulidah R. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noviyanti, NA dan Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*.
- Saragih, Hidayah Asfaro dan Setyaningrum, Dyah. 2015. Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2012. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII di Medan*. Hal. 1-26.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business* (Buku 1 dan Buku 2). Edisi Ke-4. Salemba Empat, Jakarta.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti dan Brown, Alistair. 2010. Mandatory Disclosure Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. *Journal Public Policy* January 2010.
- , dan Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditting*, Vol.8, No.1, pp 30-42.
- , Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti dan Brown, Alistair. 2010. Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia. *Hibah Penelitian Publikasi Internasional LP2M UNS*.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sumarto, Hetifa. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Suryaningsih, Ni Made dan Sisdyani, Eka Ardhani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Volume 15, hal 1453-1481.

- Susantih, H dan Saftiana, Y. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wild, Jhon J, dkk. 2005. *Financial Statement Analysis*. Salemba Empat, Jakarta.